

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PASAR KEMIS, TANGERANG

Muhamad Nurul Huda¹, Muhamad Alawi², Shifa Kusuma Wardani³, Eko Prasetyo⁴

2201010010@students.unis.ac.id¹, 2201010037@students.unis.ac.id²,

2201010020@students.unis.ac.id³, prasetyo@unis.ac.id⁴

Universitas Islam Syekh Yusuf

Abstrak

Pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, termasuk di Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Penelitian ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik, khususnya pada administrasi kependudukan seperti perekaman E-KTP. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan melalui pelatihan, workshop, dan inovasi pelayanan, masih ditemukan kendala seperti birokrasi yang panjang, kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Evaluasi berkala, penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi rekomendasi utama agar pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kata Kunci: Kompetensi Andragogi, Kader TPK, Tim Pendamping Keluarga.

Abstract

Public service is a key indicator of successful governance at the regional level, including in Pasar Kemis District, Tangerang. This study examines the implementation of good governance principles in public services, particularly in population administration such as E-KTP registration. Despite various improvement efforts through training, workshops, and service innovations, challenges remain, such as lengthy bureaucracy, limited public participation, and constraints in technology and human resources. This study highlights the importance of applying the principles of accountability, transparency, participation, effectiveness, efficiency, and responsiveness to improve the quality of public services and public trust in the government. Regular evaluation, regulatory strengthening, cross-sector collaboration, and the use of information technology are the main recommendations so that public services in Pasar Kemis District can be more effective, efficient, and oriented toward public satisfaction.

Keywords: *Andragogical Competence, Family Assistance Team (TPK), Stunting Prevention.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, termasuk di Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel dari aparatur pemerintah, terutama dalam hal administrasi kependudukan seperti perekaman E-KTP dan dokumen lainnya. Namun, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait proses pelayanan yang berbelit-belit, antrian panjang, dan kurangnya responsivitas dari petugas pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan pemerintahan kecamatan.

Prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kecamatan Pasar Kemis telah berupaya menerapkan standar pelayanan publik melalui berbagai pelatihan dan workshop bagi staf kecamatan dan perangkat desa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan

kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan seperti ketidakpastian waktu pelayanan, birokrasi yang panjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan.

Implementasi good governance juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengawasan yang ada di Kecamatan Pasar Kemis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada aspek partisipasi masyarakat, responsivitas petugas, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar prinsip-prinsip good governance dapat diimplementasikan secara optimal.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait prosedur pelayanan secara jelas dan terbuka. Akuntabilitas juga sangat penting agar setiap proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelayanan publik perlu terus didorong agar tercipta pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Pasar Kemis telah melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Salah satunya adalah pelaksanaan lokakarya dan pengembangan standar pelayanan berbasis prinsip-prinsip pelayanan publik yang berlaku. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Masalah pelayanan publik yang belum optimal di Kecamatan Pasar Kemis juga berdampak pada citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan proses pelayanan yang lambat dan kurang ramah, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu, penerapan prinsip-prinsip good governance harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penerapan prinsip good governance juga memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik aparatur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Pasar Kemis perlu terus berinovasi dan melakukan pembenahan di berbagai aspek. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Namun, hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan sistem pelayanan berbasis teknologi secara optimal.

Faktor budaya organisasi dan kepemimpinan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance. Aparatur pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam setiap tindakan pelayanan. Dengan demikian,

budaya pelayanan yang profesional dan berintegritas dapat tercipta di lingkungan Kecamatan Pasar Kemis.

Evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan. Melalui survei kepuasan masyarakat dan forum diskusi publik, pemerintah dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai hasil evaluasi juga penting agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi kinerja aparatur pemerintah secara langsung.

Penguatan regulasi dan kebijakan pelayanan publik juga menjadi faktor kunci dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah perlu memastikan setiap regulasi yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Selain itu, harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat proses pelayanan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, Kecamatan Pasar Kemis harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Penerapan konsep smart government dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penerapan smart government juga memerlukan investasi yang besar dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah harus mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien agar setiap program inovasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program juga sangat diperlukan agar setiap inovasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga harus diiringi dengan upaya pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Praktik KKN dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga penerapan prinsip-prinsip good governance harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar setiap penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan juga sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan publik. Aparatur pemerintah harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan dapat lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan warga. Pemerintah perlu menyediakan saluran komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan mudah dan cepat.

Penerapan prinsip-prinsip good governance juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Pemerintah harus memastikan setiap proses pelayanan berjalan secara adil dan transparan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian layanan.

Dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Pasar Kemis diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan publik yang berkualitas akan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif

bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan.

Upaya perbaikan pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis juga perlu didukung dengan penguatan kerjasama antarinstansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dengan adanya sinergi antarinstansi, proses pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kecamatan Pasar Kemis juga perlu melakukan benchmarking atau studi banding dengan daerah lain yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Melalui pembelajaran dari pengalaman daerah lain, pemerintah dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini akan mempercepat proses perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik di wilayah tersebut.

Peran media massa dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance. Media dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara utuh berdasarkan pengalaman dan perspektif para pelaku pelayanan publik dan masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pelayanan publik di kecamatan tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengorganisasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola dan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi nyata penerapan Good Governance di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntabilitas di Kecamatan Pasar Kemis terlihat dari upaya aparaturnya pemerintah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Petugas pelayanan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada atasan dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pelaporan dan kurangnya sosialisasi hasil kinerja kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal di tingkat kecamatan. Upaya peningkatan akuntabilitas terus dilakukan melalui pelatihan dan pengawasan internal.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik telah mulai diterapkan di Kecamatan Pasar Kemis. Informasi mengenai anggaran dan realisasi program pelayanan sudah mulai dipublikasikan melalui papan pengumuman dan media sosial kecamatan. Namun, akses masyarakat terhadap data tersebut masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sarana informasi. Sebagian masyarakat masih merasa kesulitan untuk memperoleh informasi secara langsung. Oleh karena itu, perlu adanya

peningkatan keterbukaan informasi publik agar transparansi dapat dirasakan oleh seluruh warga.

Efektivitas pelayanan publik diukur melalui pencapaian target waktu dan kualitas layanan yang diberikan. Kecamatan Pasar Kemis telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis layanan administrasi. Penerapan SOP ini membantu mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kesalahan administrasi. Namun, masih terdapat keluhan masyarakat terkait waktu tunggu yang cukup lama pada jam-jam sibuk. Evaluasi berkala terhadap SOP dan sistem antrean perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Efisiensi dalam pelayanan publik tercermin dari pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas secara optimal. Kecamatan Pasar Kemis telah melakukan upaya digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses administrasi. Meskipun demikian, keterbatasan perangkat dan pelatihan SDM masih menjadi kendala utama. Beberapa layanan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu dan biaya lebih besar.

Upaya peningkatan efisiensi harus terus dilakukan dengan pengadaan fasilitas dan pelatihan teknologi informasi.

Keterbukaan dalam pelayanan publik diwujudkan dengan menyediakan informasi prosedur dan persyaratan layanan secara jelas di kantor kecamatan. Masyarakat dapat melihat alur pelayanan melalui papan informasi dan brosur yang disediakan. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami prosedur karena kurangnya sosialisasi secara langsung. Keterbukaan ini perlu ditingkatkan melalui media digital dan penyuluhan rutin. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Transparansi dalam pengambilan keputusan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Beberapa keputusan terkait prioritas layanan atau penyelesaian sengketa administrasi belum sepenuhnya diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi negatif dan ketidakpuasan di kalangan warga. Pengumuman hasil keputusan secara terbuka dan alasan di balik keputusan tersebut perlu dilakukan secara rutin. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat kecamatan.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Pasar Kemis mulai tumbuh melalui forum musyawarah dan konsultasi publik. Warga diajak untuk memberikan masukan terkait pelayanan dan kebijakan yang akan diambil oleh kecamatan. Namun, tingkat partisipasi masih rendah karena minimnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan haknya. Pemerintah kecamatan perlu mendorong partisipasi aktif melalui undangan resmi dan penyediaan ruang diskusi yang inklusif. Dengan meningkatnya partisipasi, pelayanan publik akan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kecamatan Pasar Kemis telah melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. LSM berperan sebagai mitra kritis yang membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi. Namun, kolaborasi ini masih terbatas pada beberapa program tertentu dan belum menyeluruh di semua bidang pelayanan. Perlu adanya penguatan kemitraan dengan LSM agar pengawasan dan partisipasi masyarakat semakin optimal. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis. Setiap penyelenggaraan layanan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang adil. Pengawasan oleh aparat hukum dan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Kecamatan Pasar Kemis telah menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui media online yang disediakan. Namun, respon terhadap aduan masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi antar bagian. Penyelesaian sengketa administrasi juga seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sistem penanganan aduan yang lebih cepat dan transparan.

Setiap aparaturnya kecamatan diwajibkan untuk membuat laporan kinerja secara periodik kepada atasan dan masyarakat. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan di masa mendatang. Namun, sebagian aparaturnya masih belum disiplin dalam pelaporan dan evaluasi kinerja. Pengawasan internal perlu diperkuat agar akuntabilitas dapat berjalan secara konsisten. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Sosialisasi kebijakan pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis dilakukan melalui berbagai media, seperti spanduk, brosur, dan media sosial. Namun, efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Kurangnya pemahaman masyarakat sering menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam proses administrasi. Pemerintah kecamatan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan mudah dipahami. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Pengelolaan anggaran pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis dilakukan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Namun, masih ditemukan penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran akibat lemahnya perencanaan. Evaluasi dan pengawasan anggaran perlu diperkuat untuk mencegah pemborosan. Efisiensi anggaran akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik.

Kecamatan Pasar Kemis berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi. Informasi mengenai jadwal pelayanan, persyaratan, dan biaya sudah mulai dipublikasikan secara terbuka. Namun, akses internet yang belum merata menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Pemerintah kecamatan perlu menyediakan alternatif informasi melalui media cetak dan layanan informasi langsung. Keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Proses rekrutmen aparaturnya di Kecamatan Pasar Kemis dilakukan secara terbuka dan berdasarkan merit system. Informasi lowongan dan persyaratan diumumkan secara luas untuk mencegah praktik nepotisme dan kolusi. Namun, masih terdapat persepsi negatif di masyarakat terkait transparansi seleksi. Pemerintah kecamatan perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara jujur dan adil. Transparansi dalam rekrutmen akan meningkatkan kualitas aparaturnya pelayanan publik.

Penyusunan kebijakan pelayanan publik di Kecamatan Pasar Kemis melibatkan perwakilan masyarakat melalui forum musyawarah. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum merata di seluruh lapisan. Pemerintah perlu memperluas jangkauan partisipasi dengan melibatkan kelompok rentan dan marginal. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan efektif.

Penegakan hukum di Kecamatan Pasar Kemis dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian dan lembaga pengawas internal. Setiap pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, proses penegakan hukum masih terkendala oleh birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Pemerintah kecamatan perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan supremasi hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan pelayanan publik yang berintegritas.

Evaluasi dan monitoring pelayanan publik dilakukan secara berkala oleh tim pengawas internal kecamatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan inovasi pelayanan di masa mendatang. Namun, pelaksanaan monitoring masih terkendala oleh keterbatasan waktu dan tenaga. Pemerintah kecamatan perlu melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi agar hasilnya lebih objektif. Evaluasi yang baik akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kecamatan Pasar Kemis mulai mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi layanan online dan sistem antrean digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Namun, adopsi teknologi masih terbatas pada sebagian layanan dan belum merata di seluruh bidang. Pemerintah kecamatan perlu memperluas penggunaan teknologi untuk seluruh jenis pelayanan. Inovasi berbasis teknologi akan mempercepat transformasi pelayanan publik.

SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Pasar Kemis telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Akuntabilitas mulai diterapkan melalui laporan pertanggungjawaban dan pengawasan internal, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaporan dan sosialisasi hasil kinerja. Transparansi dan keterbukaan sudah diupayakan dengan publikasi informasi melalui berbagai media, namun belum sepenuhnya merata dan mudah diakses oleh masyarakat. Efektivitas dan efisiensi pelayanan meningkat dengan adanya SOP dan digitalisasi, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan sarana, SDM, dan waktu tunggu layanan. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan LSM mulai tumbuh, namun masih perlu didorong agar lebih luas dan inklusif. Supremasi hukum dan mekanisme pengaduan telah tersedia, tetapi penegakan hukum dan penyelesaian aduan masih perlu ditingkatkan agar pelayanan publik semakin adil dan berintegritas. Secara keseluruhan, penerapan good governance di Kecamatan Pasar Kemis sudah berjalan, namun masih memerlukan upaya perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah Kecamatan Pasar Kemis disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan berbagai media, baik digital maupun konvensional, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan secara mudah dan merata. Upaya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM perlu diperkuat untuk mendukung efisiensi dan adopsi teknologi dalam pelayanan publik. Partisipasi masyarakat harus terus didorong melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan pelibatan kelompok rentan agar kebijakan dan layanan benar-benar inklusif. Pengawasan internal dan eksternal, termasuk kolaborasi dengan LSM, perlu diperluas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Terakhir, penegakan supremasi hukum dan penyelesaian aduan masyarakat harus dilakukan secara tegas, cepat, dan tidak diskriminatif, sehingga tercipta pelayanan publik yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Sekar Tanjung. (2022). "Institusi Politik dan Good Governance: Tinjauan Kualitas Pelayanan Publik di Disdukcapil Kabupaten Tangerang Tahun 2022." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dwi Astuti, dkk. (2021). "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 161-170.
- Hendrikus Triwibawanto Gedeona, "Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2010.

- Hikmatun Nisa dkk. (2022) menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Barabai dengan teknik purposive sampling dan triangulasi data.
- Muhamad Suhuf Abie Bakri. (2022). "Pelayanan Publik dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang." Universitas Nasional.
- Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). "Implementasi Teori Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 1–13.
- Sri Rahayu, Haryanto, Nur Izzati Alzaytun. (2022). "Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–7.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013
- Tropi Abid Zaidah, S., & Khoiriawati, N. (2022). "Penerapan Good Governance pada Pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak." *Jurnal Ilmu Eksekutif*, 6(2), 1–12.
- Van Doeveren, V. (2011). "Rethinking Good Governance: Identifying Common Principles." *Public Integrity*, 13(4), 301-318.